KINERJA KEUANGAN DESA

DITINJAU DARI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si.
Vina Arnita, S.E., M.Si.

KINERJA KEUANGAN DESA

DITINJAU DARI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Kinerja Keuangan Desa merupakan alat penilaian aktivitas yang dilakukan desa terhadap penggunaan belanja desa agar dapat mencapai pendapatan desa yang sudah ditentukan. Ukuran sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya agar pemerintah dapat mengambil keputusan. Pemerintah desa dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal dengan melakukan tahap awal seperti membuat perencanaan melalui observasi diawal tahun mengenai sumber daya yang dimiliki desa kemudian pengawasan dan evaluasi terhadap target yang belum tercapai dengan mengatur strategi-strategi dalam pencapaian kinerja keuangan.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

EC00202338870
ISBN 978-623-151-019-8
9 786231 510198

KINERJA KEUANGAN DESA DITINJAU DARI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si.
Vina Arnita, S.E., M.Si.

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

KINERJA KEUANGAN DESA DITINJAU DARI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penulis : Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si.
Vina Arnita, S.E., M.Si.

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-151-019-8

No. HKI : EC00202338870

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Kinerja Keuangan Desa Ditinjau dari Pendapatan dan Belanja Desa". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas kinerja keuangan desa melalui pendekatan rasio dengan analisis pendapatan dan belanja desa sebelum dan masa pademik covid19. Pengelolaan Keuangan Desa yang tepat sasaran akan membuat optimalisasi dalam menggunakan pembiayaan belanja sehingga pendapatan desa termsuk pemdapatan asli desa meningkat.

Pengelolaan keuangan desa mempengaruhi kinerja suatu pembangungan desa sehingga desa harus mampu berperan aktif dalam mengatur kinerja keuangan desanya secara efisien dan efektif. Dengan menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan kita dapat menganalisis derajat desentralisasi, rasio ketergantuang keuangan desa, analisis pertumbuhan pendapatan desa, rasio efisiensi PADesa, Rasio Efektivitas PADesa, Rasio Belanja Desa dan Rasio Belanja Desa Per Bidang serta ingin melihat apakah ada perbedaan kinerja keuangan desa sebelum dan masa pademik covid19.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku

ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Keuangan Desa 1
B. Teori Signaling dalam Pemerintah 4
BAB 2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **7**
A. Pengertian Pendapatan Desa 7
B. Sumber-Sumber Pendapatan Desa 8
C. Pengertian Belanja Desa 11
D. Jenis-Jenis Belanja Desa 12
E. Klasifikasi Belanja Desa 13
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 14
BAB 3 REALISASI KEUANGAN DESA **17**
A. Pengelolaan Keuangan Desa 17
B. Perkembangan Realisasi Pendapatan Desa 24
C. Perkembangan Belanja Desa 26
D. Rasio Kinerja Keuangan Desa 30
BAB 4 KINERJA KEUANGAN DESA **45**
A. Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa 45
B. Kinerja Keuangan Desa dari Sisi Pendapatan Sebelum dan Masa Pademik Covid-19 46
C. Kinerja Keuangan Desa dari Sisi Belanja Sebelum dan Masa Pademik Covid-19 49
BAB 5 PENUTUP **54**
DAFTAR PUSTAKA **57**
TENTANG PENULIS **60**

KINERJA KEUANGAN DESA DITINJAU DARI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si.
Vina Arnita, S.E., M.Si.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Keuangan Desa

Desa merupakan bagian terbesar dari wilayah negara Indonesia yang terbesar di seluruh pelosok tanah air. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik. Desa sebagai institusi sosial sekarang telah memiliki posisi penting sebagai institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintah Indonesia. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakatmenjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Terbentuknya suatu desa yang sejahtera pasti adanya sangkut paut dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola keuangan secara baik untuk suatu pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Desa Pematang Serai berada di Pemerintah Kabupaten Langkat di Kecamatan Tanjung Pura. Desa tersebut merupakan Desa wisata yang terkenal dengan adanya Goel, kenderaan yang digunakan diatas danua buatan masyarakat sekitar. Berikut ini data laporan realisasi pendapatan dan belanja desa pemerinth

BAB 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Pengertian Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa. Pendapatan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Kekayaan desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

BAB 3

REALISASI KEUANGAN DESA

A. Pengelolaan Keuangan Desa

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa". Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari 5 tahap yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan desa.

1. Perencanaan Keuangan Desa

   Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa selanjutnya disampaikan oleh Kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama

BAB 4

KINERJA KEUANGAN DESA

A. Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga adalah sebagai berikut ini

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009). Pengukuran kinerja keuangan diukur dengan beberapa rasio keuangan desa yang menjadi tolak ukur dalam penilaian keuangan desa.

BAB 5

PENUTUP

Kinerja Keuangan desa melalui pendekatan rasio dengan analisis pendapatan desa. Hasil rasio-rasio di analisis pendapatan desa dibandingkan dengan penilaian permendagri tahun 1996. Analisis pendapatan menggunkan 5 rasio yaitu Derajat Desentraslisasi mengalami peningkatan yang hanya 10% dari tahun sebelumnya dan rasio ketergantungan keuangan desa di desa pematang serai sangat tinggi. Kemudian analisis pertumbuhan pendapatan desa masih menurun selama 2019 sampai 2021 sedangkan rasio efisiensi pendapatan desa dengan kondisi kurang efisien dan rasio efektivitas pendaptan desa mengalami kondisi yang efektif.

Kinerja Keuangan desa melalui pendekatan rasio dengan analisis belanja desa. Hasil rasio-rasio di analisis pendapatan dibandingkan dengan penilaian permendagri tahun 1996. Analisis belanja desa menggunakan 6 rasio yaitu rasio belanja desa bidang penyelenggara pemerintah desa, bidang pelaksana pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana dalam kondisi perkembangan yang fluktuasi setiap tahunnya dan rasio efisiensi belanja desa ditahun 2018 tidak efisien, tahun 2019 dan 2021 kurang efisien dan tahun 2020 cukup efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Anugeraheni. Ni Kadek Diksi Dan Yuniarta. Gede Adi.(2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 – 2019 .Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol :13 No : 2. Singaraja. Bali.

Bastian, Indra. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI

Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Desa Tahun 20018-2021*, Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Damayanti. Ade, Surianto, Sarong. Sumarni Dan R.Baso. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa (Studi Pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa). Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 21 Nomor 3, Hal. 654-666, September - Desember 202.

Irma. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Jurnal Katalogis, (Online), Vol, 3. No. 1. (http://jurnal.untad.ac.id, diakses 10 April 2020)

Mahmudi. (2009). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik,*Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo.(2007), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:ANDI

Martiastuti. Hafsyah Intan, Nugroho.Agus dan Widyawati. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian E-ISSN: 2614-6053 P-ISSN: 2615-2878 Volume 6, Nomor 2, Mei 2021 www.jim.unsyiah.ac.id/JFP

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Qodriyani. Asri Laela, Sumandar dan H. Ririh Sri (2017). Analisis Efisiensi Penggunaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi kasus Desa Bogares Kidul, Kec.Pangkah Kab Tegal). Politeknik Harapan Bersama.

Ramadhani Et Al. (2019).Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBdesa. (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). Jurnal Akuntansi Universitas Jember.Vol. 17 No. 1.

Syah. Firman, Aulia dan Hididayat. M (2021). Analisis Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong). Jurnal Economix Volume 9 Nomor 1 Juni 2021.

Sunarya. Herni dan Lamaya. Fauziyah (2017). Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo NTT. Jurnal Akuntansi. Volume 4. No.3.

Ulum, Ihyahul. (2009). *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

TENTANG PENULIS

Dr.Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si.

Dosen Tetap Pascasarjana Program Studi Magister Ekonomi Bidang Ilmu Akuntansi Pemerintah, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Menjabat sebagai Kepala Program Studi Akuntansi sejak 2021 hingga sekarang. Telah menyelesaikan studi Magister Akuntansi di Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 dan melanjutkan Program Doktoral Ekonomi di Universitas Andalas Tahun 2020. Selain itu penulis juga aktif dalam melakukan penelitian – penelitian di bidang Akuntans Sektor Publik baik yang diselenggarakan oleh Internal Universitas maupun Eksternal.

Vina Arnita, S.E., M.Si.

Vina Arnita adalah dosen tetap program studi akuntansi fakultas social sains Universitas Pembangungan Panca Budi.Sarjana akuntansi diselesaikan di Universitas Harapan Medan. Program magister diselesaikan dua master yaitu universitas sains Malaysia dan universitas sumatera utara. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang mengajar dalam bidang akuntansi yaitu komputer akuntansi bisnis,pasar modal dan investasi. Dalam berkarya sebagai dosen, pernah mengikuti seminar nasional maupun international yang diselenggarakan dibeberapa kota dan Negara.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202338870, 27 Mei 2023
Pencipta		
Nama	:	**Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si. dan Vina Arnita**
Alamat	:	Perum Graha Arradea Blok CB-5 Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bogor, Jawa Barat, 16680
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si. dan Vina Arnita**
Alamat	:	Perum Graha Arradea Blok CB-5 Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bogor, Jawa Barat, 16680
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Kinerja Keuangan Desa Ditinjau Dari Pendapatan Dan Belanja Desa**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	8 Mei 2023, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000471791

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.